

ANALISIS DAMPAK PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHAAP KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA KENDARI

La Ode Abdul Manan¹, Suharlihan², Sufrianto³, Septiani⁴
laodeabdulmanan9@gmail.com

Abstrak

Analisis Dampak Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Kendari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Kendari. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif statistik. Sumber data adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan model regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS Versi 26 For Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai dampak positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan hasil Uji t pada penelitian ini dampak PAD terhadap Kinerja Keuangan dengan nilai signifikan $0,000 > 0,05$.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah – Kinerja Keuangan

Abstract

This study aims to find out how the impact of Local Own Revenue (PAD) on Financial Performance in Kendari City Government. This research is a statistical descriptive research, the data source is secondary data. The analytical method used is quantitative analysis with a simple regression model, using SPSS Version 26 for windows. The results of this study indicate that Regional Original Income has a positive impact on financial performance. Based on the results of the t test in this study the impact of PAD on financial performance with a significant value of $0.000 > 0.05$.

Keywords: Regional Original Income - Financial Performance

I. Pendahuluan

Reformasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di republik indonesia tercinta. Salah satu dari sekian banyak reformasi yang membawa kepada suatu perubahan adalah reformasi hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang lebih dikenal dengan "Otonomi Daerah". Walaupun istilah otonomi daerah bukanlah hal yang baru karena sudah ada seiring dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah direvisi dengan undang undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diarahkan pada perubahan pola pertanggung-jawaban daerah atas dana yang dialokasikan. Pola pertanggung jawaban horizontal (horizontal accountability) kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Otonomi daerah pada hakekatnya adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Bastian (2012 : 2) menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan

pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut.

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, salah satu bentuk pelayanan yang telah direvisi dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 dan undang-undang nomor 33 Tahun 2004. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 32 perlu dibarengi dengan pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 33. Tanpa adanya otonomi keuangan daerah tidak akan pernah ada otonomi bagi pemerintah daerah. Jadi kedua Undang-undang tersebut saling melengkapi. Sumber-sumber keuangan daerah menurut UU. No 33 Tahun 2004 (dalam Halim, 2011) terdiri dari; Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah (hibah dan dana darurat). Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat komponen besar yaitu; Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya, dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Dasar hukum dari sumber-sumber PAD tersebut mengacu pada undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebenarnya Undang-undang ini sangat membatasi kreativitas daerah dalam menggali sumber penerimaan aslinya karena hanya menetapkan enam jenis pajak yang boleh dipungut oleh Kabupaten atau Kota. Dalam sistem pemerintahan yang sentralistis, UU itu tidak terlalu menjadi masalah, tetapi dalam sistem desentralisasi fiskal seperti dalam UU No. 33/2004, undang-undang tahun 1997 tersebut menjadi tidak relevan lagi, karena salah satu syarat terselenggaranya desentralisasi fiskal adalah ada kewenangan pemerintah daerah yang cukup longgar dalam memungut pajak lokal. Oleh karena itu tanpa ada revisi terhadap Undang-undang ini, peranan PAD di masa datang tetap akan menjadi marginal seperti pada masa Orde Baru mengingat pajak-pajak potensial bagi daerah tetap menjadi wewenang pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten hanya memiliki enam sumber pendapatan asli daerah dimana sebagian besar dari padanya dari pengalaman di masa lalu sudah terbukti hanya memiliki peranan yang relatif kecil bagi kemandirian daerah. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2011 : 199). Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja pemerintah daerah yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah.

Seiring dengan besarnya tuntutan kepada daerah untuk dapat melaksanakan otonomi daerah, maka salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah mengoptimalkan peran PAD di dalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjawab bagaimana peran PAD mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Kendari.

Berdasarkan uraian di atas bahwa kemampuan Pemerintah Kota Kendari dalam meningkatkan pendapatan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan target atau anggaran pendapatan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal. Dalam hal ini peneliti akan meneliti Dampak Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kendari sebagai salah satu kriteria kesiapan pemerintah Kota Kendari.

II. Tinjauan Pustaka

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di definisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Bagian Laba Usaha Daerah (PDAM, Bank Daerah)
4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
5. Lain PAD yang sah seperti pendapatan Bunga, jasa giro, komisi, dan potongan.

Halim (2004: 125) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil Pajak Daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

1. Pajak Daerah
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ini akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Retribusi Daerah
Adalah pungutan daerah sebagai pembyaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Terdapat beberapa kelompok retribusi yang bisa dimanfaatkan pemerintah agar bisa dimasukkan kedalam kas daerah.
3. Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan
Adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan sub-bidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara non-publik. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan Bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Sumber ini dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar. Keempatnya akan bersinergi sehingga akan menghasilkan PAD yang mampu menunjang jalannya perekonomian disebuah daerah. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah juga memiliki pengaruhnya tersendiri baik bagi pengeluaran pemerintah maupun jumlah penduduk.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif :

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang termuat dalam laporan realisasi anggaran dan PAD Pemerintah Kota Kendari dari tahun 2018-2022 serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Sumber Data yang digunakan dalam menelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi laporan keuangan seperti realisasi PAD yang meliputi, realisasi pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, serta pendapatan lain yang sah 2018 sampai dengan tahun 2022, dan bantuan pemerintah pusat.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Pada tahun 2009 terdapat penataan kelembagaan Instansi Pemerintah Daerah, salah satunya BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) yang bertugas mengelola keuangan Daerah Kota Kendari dan KPPD (Kantor Pelayanan Pajak Daerah) yang bertugas mengelola pendapatan pajak daerah digabung menjadi satu yaitu DPDPK (Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Kota Kendari) berdasarkan peraturan daerah Kota Kendari Nomor : 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Kendari. DPDPK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus pengelolaan pendapatan daerah.

2. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) KOTA KENDARI

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Kendari merupakan unsur penunjang urusan Pemerintah di bidang keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah maka dibentuklah Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari (BAPENDA) atau lebih dikenal dengan nama Dinas Pendapatan dan Aset Daerah (DPKAD). Perubahan nama DPKAD menjadi BAPENDA tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor (1) Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, (2) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, (3) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Kendari, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) mulai tanggal 1 Januari 2017 berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Tabel
PAD Kota Kendari Tahun 2018-2022

No	Tahun	Penerimaan Rp/Juta	%
1	2018	176.116,07	14
2	2019	215.330,98	17
3	2020	221.823,16	18
4	2021	298.135,73	24
5	2022	323.242,63	26
Rata-rata			100

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Bahwa pada tahun 2018 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari sebesar Rp.176.116,07 atau sebesar 14%. Penerimaan pendapatan asli daerah menurun karena JKN dan BOS berpindah tempat ke belanja lain-lain, PAD bukan saja retribusi daerah atau pajak daerah tapi pendapatan lain-lain dari pusat, tapi dia beralih makanya mengurangi penerimaan pendapatan asli daerah.

2. Bahwa Pada tahun 2019 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari sebesar Rp.215.330,98 atau sebesar 17%. Di akibatkan penurunan pendapatan pada sektor pajak dan retribusi.
3. Bahwa Pada tahun 2020 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari sebesar Rp.221.823,16 atau sebesar 18%. penurunan pendapatan disebabkan pandemi Covid-19.
4. Bahwa Pada tahun 2021 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar Rp. 298.135,73 atau sebesar 24%. Sektor pajak yang meningkat
5. Bahwa Pada tahun 2022 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar Rp. 323.242.63 atau sebesar 26%. Dikarenakan sektor pajak yang meningkat, seperti pajak Penerangan Jalan Umum yang mencapai 11 miliar.

Tabel

Kinerja Keuangan Kota Kendari Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari Rp/Juta	Total Penerimaan Daerah Kota Kendari Rp/Juta	%	Kemampuan Keuangan Daerah
2018	176.116.07	1.068.481	164	Efektif
2019	215.330.98	1.120.005	192	Efektif
2020	221.823.16	1.037.358	213	Efektif
2021	298.135.73	1.169.701	255	Efektif
2022	323.242.63	1.351.167	240	Efektif
Rata-rata			164	Efektif

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa efektivitas Kinerja Keuangan Kota Kendari dari tahun 2018-2022 diperoleh nilai rata-rata efektif yaitu 165%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio efektivitas Pemerintah Kota kendari tahun 2018 sebesar 164%. Berdasarkan kriteria pengukuran dari Kepmendagri No. 690.900.327, maka rasio efektivitas tahun 2018 berada dalam kategori efektif, demikian juga pada kinerja keuangan tahun 2019 dengan rasio 192% berada dalam kategori efektif, tahun 2020 sebesar 213% dalam kategori efektif, ditahun 2021 mengalami peningkatan lagi sebesar 255%, rasio efektivitas tahun 2022 240% dikategorikan efektif.

Deskripsi Statistik Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	5	176.12	323.12	246.9292	61.41868

Kinerja Keuangan	5	1.04	1.35	1.1490	.12364
Valid N (listwise)	5				

Sumber: Data Sekunder diolah 2023

Semua variabel memiliki nilai yang maksimum dan minimum positif, Data tabel tersebut secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari (X) memiliki nilai minimum 176.12 dan nilai maksimum 323.12 dengan rata-rata Pendapatan Asli Daerah Rp. 246.929,2 (Juta).
2. Variabel Kinerja Keuangan Kota Kendari (Y) memiliki nilai minimum 1.04 dan nilai maksimum 1.35 dengan rata-rata Kinerja Keuangan memiliki Rp. 1.149,00 (Juta).

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a					
Model			Standardized Coefficients	T	Sig.
			Beta		
1 (Constant)	.725	.154		4.722	.018
Pendapatan Asli Daerah	.002	.001	.853	2.828	0.000

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan dari hasil analisis data dengan menggunakan SPSS 26, maka persamaan regresi sebagai berikut: $Y = 0,725 + 0,000$

Keterangan:

1. Nilai constant sebesar 0,725 artinya jika tidak terjadi perubahan variabel Pendapatan Asli Daerah (nilai X = 0) maka kinerja keuangan Pemerintah Kota Kendari 0,725 atau 72,5%.
2. Nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah adalah 0,000 dengan nilai signifikan berada di bawah 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap variabel kinerja keuangan.

Hasil Uji Korelasi Durbin-Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.853 ^a	.727	.636	07457	1.702

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil hipotesis terhadap data penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: Dari hasil output diatas menunjukkan, Durbin-Watson $d = 1.702$ dan nilai batas Durbin Watson sebesar 1.4002. nilai 1.4002 dapat dilihat dari tabel Durbin Watson dengan $n = 5$ dan $k = 1$ dimana K adalah banyaknya variabel prediktor, karena nilai $(1 - 1.702) > 1.4002$ atau $1.4002 < 1.702$ ($1 - 1.4002$) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi auto korelasi. Tidak terjadi autokorelasi karena pendapatan asli daerah berdampak positif terhadap kinerja keuangan, dengan nilai R 0,853 atau 85,3% dan R square 0,727 atau 72,2%

Hasil Uji Parsial t

Coefficients ^a						
Model				Standardized Coefficients	T	Sig.
				Beta		
1	(Constant)	.725	.154		4.722	.018
	Pendapatan Asli Daerah	.002	.001	.853	2.828	0.000

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Dari hasil output diatas menggunakan SPSS 26 maka dapat diketahui bahwa: Pendapatan Asli Daerah memberikan koefisien parameter sebesar 2,828 dengan nilai signifikan 0,000 dimana $< 0,05$ maka Pendapatan Asli Daerah berdampak positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Kendari.

Dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kendari

Pendapatan asli daerah berdampak positif terhadap kinerja keuangan, artinya semakin besar pendapatan asli daerah (PAD), semakin baik kinerja keuangan Kota Kendari sesuai dengan prinsip-prinsip Otonomi Daerah. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Suprianto (2013), yang menemukan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berdampak positif terhadap kinerja keuangan. Dengan pemahaman bahwa kinerja keuangan menunjukkan kemampuan kemandirian keuangan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan Pemerintahnya dan semakin bertambahnya pendapatan asli daerah tiap tahunnya di Kota Kendari. Pendapatan asli daerah dapat diartikan sebagai pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik Pemerintah maupun Swasta karena perolehan jasa yang diberikan oleh Pemerintah tersebut. Oleh sebab itu Daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi, dan penerimaan lain yang sah dan diatur dalam Undang-Undang. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan Pemerintah.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian data dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan pengolahan data SPSS 26, maka selanjutnya akan dilakukan pembahasan dari hasil analisis data tentang bagaimana dampak variabel Pendapatan Asli Daerah (X) independent dengan variabel kinerja keuangan (Y) dependent. Dari hasil pengujian hipotesis diatas diketahui bahwa Pendapatan

Asli Daerah berdampak secara positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini terbukti ditunjukkannya dampak positif dan signifikan dimana pada hasil uji t diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah memberikan koefisien parameter sebesar 2,828 dengan nilai signifikan 0,000 dimana $< 0,05$ maka Pendapatan Asli Daerah berdampak positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Kendari. Dengan nilai regresi sederhana PAD adalah 0,00 dengan nilai signifikan berada dibawah 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berdampak positif terhadap variabel kinerja keuangan.

Dengan hasil pengolahan data koefisien korelasi yang menunjukkan Durbin-Watson $d = 1.702$ dan nilai batas Durbin Watson sebesar 1.4002 nilai 1.4002 dapat dilihat dari tabel Durbin Watson dengan $n = 5$ dan $k = 1$ dimana K adalah banyaknya variabel prediktor, karena nilai $(1 - 1.702) > 1.4002$ atau $1.4002 < 1.702 (1 - 1.4002)$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi auto korelasi.

Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai pendapatan asli daerah yang baik dapat berdampak positif pada kinerja keuangan Pemerintah Kota Kendari. Oleh sebab itu daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi, dan penerimaan lain yang sah dan diatur dalam Undang-Undang

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Dampak Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kendari, dengan nilai $t 0,00 < 0,005$ dapat disimpulkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) keseluruhan berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Kendari, sesuai dengan prinsip-prinsip Otonomi Daerah.

Daftar Pustaka

- Andi Ricardy Putri.2022. Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Banyuwasin. Jurnal Vol.6 No.4. Penerbit Program Studi Manajemen Informatika Politeknik Ganesha Medan.
- Dedek Rahmawati.2022. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kab/Kota di Prov. Lampung Perspektif Ekonomi Tahun 2013-2017. Tesis.Universitas Raden Intan Lampung.
- Dian Budi Susanti, Sri Rahayu, Siska P.2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Study Pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 – 2014).
- Eko Diyah Nurkhayati.2022. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo.
- Gusti Della Elsera.2017. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi. Kalimantan Selatan.
- Halim.2002: 126. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- Junaidi (<http://junaidichaniago.wordpress.com>).
- Muhammad Iqbal.2019. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Jawa Tengah Tahun 2014-2016). Tesis.Universitas Islam Sultan Agung.
- Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik.2004. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. Pengukuran Kinerja Sektor Publik.2013. Mohamad. Yogyakarta.
- Nafsi Hartoyo.2017. Faktor dan Penyebab Rendahnya Pendapatan Asli Daerah. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2018.
- Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
- Peraturan Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah

- Reza Mariska.2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Jurnal Padang: Universitas Negeri Padang.
- Rukmana.2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan. Universitas Bengkulu.
- Suprianto.2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta Direktor
- Widiya Ade Siska.2014. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat. Skripsi. Universitas Andalas.